

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Telah banyak program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun tidak sedikit program tersebut yang dirasa belum tepat sasaran, dikarenakan berbagai faktor, yang diantaranya bantuan tersebut hanya difokuskan pada penyaluran dana bantuan sosial yang tidak disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini cenderung menimbulkan masyarakat yang ketergantungan. Oleh karena itu, program yang paling tepat dilakukan saat ini adalah bantuan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu yang menjembatani program ini salah satunya adalah pemberdayaan desa.

Masyarakat ketergantungan disini diartikan sebagai masyarakat yang ketergantungan bantuan sosial, seolah-olah masyarakat tersebut hidup dari dana bantuan pemerintah. Jelas bahwa hal seperti ini tidak baik masyarakat. Bantuan-bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat seharusnya dijadikan stimulant, menstimulasi munculnya kegiatan-kegiatan terkait ekonomi masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih produktif. Dengan demikian, perubahan kemandirian akan terealisasi apabila masyarakat memiliki kesadaran, inisiatif dan kreativitas.

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mempunyai pilihan sendiri, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kemampuan mereka sendiri. Mewujudkan masyarakat yang mandiri tentunya tidak mudah, perlu strategi dan perencanaan pembangunan yang akan mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai; “Proses perumusan yang didalamnya terdapat berbagai alternatif ataupun macam-macam keputusan yang bertitik tolak pada data dan fakta yang nantinya digunakan sebagai bahan acuan untuk setiap jenis kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik itu bersifat fisik maupun spiritual dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

Untuk menciptakan masyarakat yang mandiri tentu saja tidak mudah, perlu ada yang menjembatani. Hal ini dapat tercapai melalui pemberdayaan yang nantinya akan tercipta masyarakat berdaya, memiliki daya, kekuatan dan juga kemampuan. Dalam mewujudkan masyarakat mandiri tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni *Intervensi pertama*, untuk mewujudkan transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya setidaknya terdiri atas: (1) internalisasi nilai-nilai dan prinsip universal, (2) penguatan Lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok, (3) pembelajaran penerapan konsep tridaya (sosial, ekonomi, lingkungan) dalam penanggulangan kemiskinan, (4) penguatan akuntabilitas masyarakat. *Intervensi kedua*, untuk mewujudkan transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju

masyarakat mandiri setidaknya terdiri atas: (1) pembelajaran kemitraan antar-stakeholder strategis, (2) penguatan jaringan antar-pelaku pembangunan. *Intervensi ketiga*, untuk mewujudkan transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani, yaitu dengan pembangunan lingkungan pemukiman kelurahan terpadu.

Perencanaan pembangunan ditingkat Desa tentunya akan berbeda dengan perencanaan pembangunan ditingkat kota. Strategi yang digunakan oleh satu daerah (atau desa) dengan daesa yang lainnya akan berbeda karena melihat dan menyesuaikan potensi masyarakat yang ada. Masyarakat di Desa cenderung lebih membuka diri dengan program-program pemerintah. Maka untuk itu dalam setiap program pemerintah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat haruslah ada. Pembangunan desa semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kemampuan yang dapat dikembangkan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, dan kesadaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menciptakan suatu produk yang tidak kalah saing dengan produk unggulan, lembaga sosial yang turut serta dalam setiap kegiatan, terciptanya sifat partisipatif dalam setiap diri masyarakat dan masyarakat yang tidak mampu ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan produksi.

Dalam filosofi pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah menudukan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Konsep pemberdayaan

masyarakat menekankan pada sifat partipatif masyarakatnya, ini semua meliputi perumusan program, maupun pada tahap pelaksanaannya (prakteknya). Betapa pentingnya partipasi masyarakat tersebut sangat jelas, yaitu: bahwa dengan menempatkan masyarakat sebagai “subyek” pembangunan maka akan menciptakan development for society (pembangunan untuk masyarakat) (Hidayat dan Bahri, 2007:viii).

Dalam mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut lembaga-lembaga nonpemerintah telah dilihat sebagai pelaksana program yang paling kompeten. Alasan utamanya, karena lembaga-lembaga tersebut memiliki akuntabilitas dan lebih epektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dibandingkan dengan lembaga pemerintah yang ada (Hermanto, 2017:39).

Pemberdayaan tidak akan sempurna apabila tidak ada proses yang sifatnya menyeluruh diantara motivator,fasilitator dan masyarakat yang perlu diberdayakan dengan memberikan kesadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan membangun dinamika masyarakatnya. Diperlukan suatu lembaga yang kuat dan berintegritas tinggi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga yang sehat, kuat dan berdidikasi yang tinggi adalah modal awal dalam mengembangkan potensi dan sumber daya manusia. Untuk itu, dengan melalui kelembagaan maka proses pemberdayaan akan lebih terorganisir. Untuk itu pemerintah daerah yang juga berperan sebagai fasilitator harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam

proses pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Sebagian orang saja, melainkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat menengah kebawah.

Kelembagaan yang dirasa paling tepat untuk dijadikan mitra oleh pemerintah yang berpola partisipatif adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga pemberdayaan tersebut lahir dari masyarakat itu sendiri, dengan kata lain lembaga tersebut lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Lembaga pemberdayaan adalah lembaga satu-satunya yang paling dekat dan terlibat langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah ujung tombak perubahan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 8 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa dalam lingkup Kelurahan LPM adalah salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pembangunan sebagaimana yang telah dicantumkan di pasal tersebut yang Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Desa Bojong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas wilayah:

Utara : Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk

Timur : Desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paeh

Selatan: Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh

Barat : Desa Sukanah, Kecamatan Paseh

Pada umumnya masyarakat Desa Bojong bermata pencaharian petani dan buruh pabrik. Dengan adanya pergerakan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, masyarakat merasa tergerak dengan tawaran-tawaran program yang mengembangkan sumber daya manusia di masyarakat Desa Bojong. Dengan demikian masyarakat akan mempunyai tambahan pundi-pundi rupiah. Ditambah dengan adanya keahlian masyarakat, dirasa dapat diasah dan dijadikan hal positif bagi mereka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bojong dalam rangka menciptakan masyarakat mandiri yang sejahtera, menyusun beberapa program yang menegedepankan sumber daya manusia, meliputi pengelolaan bank sampah, ternak lele, dan juga ternak ayam kampung. Semua itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dari mulai pelaksanaan sampai pemasaran dan yang merasakan hasilnya pun kembali lagi kepada masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut diyakini akan menciptakan masyarakat Desa Bojong yang mandiri, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hery selaku ketua LPMD, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia ini dilakukan untuk mengembangkan bakat yang ada di masyarakat, ada berbagai jenis usaha yang dibentuk di kampung Namicalung diantaranya: ternak lele dan ternak ayam boiler. Beliau juga memaparkan kampung Namicalung adalah kampung percobaan dimana beliau mengharapkan akan ada kampung-kampung lainnya di Desa Bojong yang seperti kampung Namicalung.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mewujudkan masyarakat mandiri yang bertitik tolak pada pemberdayaan sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk Menyusun Skripsi dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung”.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, adalah:

1. Bagaimana program LPMD dalam mewujudkan masyarakat mandiri?
2. Bagaimana pelaksanaan program LPMD dalam mewujudkan masyarakat mandiri di Kp.Namicalung?

3. Bagaimana pencapaian program yang dilakukan oleh LPMD hingga tercapainya masyarakat yang mandiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program LPMD dalam mewujudkan masyarakat mandiri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program LPMD dalam mewujudkan masyarakat mandiri di Kp.Namicalung.
3. Pencapaian program yang dilakukan oleh LPMD hingga tercapainya masyarakat yang mandiri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di masyarakat, serta bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama kuliah pada permasalahan yang ada di masyarakat secara langsung.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian bisa jadi bahan acuan untuk evaluasi bagi Lembaga Pemberdayaan dalam hal kekurangan maupun ketidaksesuaian program yang telah terwujud. Selain itu, Lembaga Pemberdayaan bisa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanannya terhadap kebutuhan masyarakat.

## E. Landasan Pemikiran

### a. Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti melakukan beberapa perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan permasalahan diatas. Dengan begitu peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian untuk bahan perbandingan antara lain, yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Tata Ayu Candika, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Cisomang Barat”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa LPM lebih mengedepankan perannya dalam hal pembangunan inprastuktur yang bertujuan menciptakan kebersihan untuk semua masyarakat. Hal ini dilakukan LPM semata-mata mengabdikan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan hal sanitasi lingkungan.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dalam skripsi tersebut dituangkan tentang awal mula terbentuknya LPM di Desa tersebut. Dilatar belakangi oleh minimnya kesejahteraan sosial menjadi pemicu diadakannya LPM untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik dalam segi sandang, pangan dan papan.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Galuh K.P, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”. Dalam skripsi ini penulis lebih mengedepankan persoalan pembangunan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti akses jalan untuk mempermudah kegiatan ekonomi dan selebihnya mengadakan program penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan tersebut meliputi tentang pernikahan dini dan bahaya narkoba. Sedangkan pelatihan itu sendiri meliputi mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu yang nantinya diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Rantija Hargita Sandhi, mahasiswi Universitas Yogyakarta tahun 2015 berjudul “Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa:”, dalam skripsi ini LPM lebih dijadikan subyek

dalam penelitian tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan LPM dalam menempatkan dirinya didalam perencanaan pembangunan Desa. Namun sayangnya hasil dari penelitian tersebut tidak begitu menimbulkan hasil yang positif., didalam skripsi ini ditulis bahwa LPM belum mempunyai peraturan sendiri sehingga partisipasi LPM masih bersifat semu atau ambigu. Partisipasi LPM juga belum menyentuh kepentingan masyarakat desa karena dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum diperhatikan.

b. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (2002;243), menjelaskan bahwa peran adalah status kedudukan, dimana bahwa seseorang melakukan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka bisa dikatakan bahwa ia menjalankan suatu peranan. Dimana dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam dan karakteristik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dengan adanya peran tersebut baik individu atau kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan.

Menurut Jim Ife dalam (Zubaedi, 2013:25), pada dasarnya konsep pemberdayaan ternyata memiliki hubungan yang begitu erat antara konsep daya dan konsep ketimpangan. Menurutnya dalam proses pemberdayaan suatu masyarakat yang tidak berdaya dapat dilakukan dengan beberapa strategi, meliputi: *pertama*, melalui perencanaan dan kebijakan yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengemukakan aspirasinya.

*Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial. *Ketiga*, pemberdayaan ini memerlukan proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar yakni pemberdayaan melalui pendidikan dan kesadaran terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan bekal berupa pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakat golongan bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Program pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat selalu tergantung pada program pemberian bantuan (charity), akan tetapi memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada mereka untuk belajar mandiri agar dapat membangun dan memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Program pemberdayaan mempunyai prinsip bahwa setiap apa yang kita nikmati, sebaiknya dihasilkan dari usaha sendiri (Kartasmita, 1996; Mulyawan, 2016).

Sipahelut, (2010) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemindahan kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok masyarakat untuk menjadikan kelompok masyarakat menjadi produktif dalam mencapai kesejahteraan hidup. Pada prinsipnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan individu maupun sosial. Umdang Umdang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, dengan menggunakan sumberdaya untuk menetapkan program, kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Kekuatan yang utama dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu sifat partisipatif dari diri masyarakatnya. Mikkelson (2001:164) berargumen bahwa partisipasi mempunyai peranan sebagai suatu proses aktif yang dimana orang atau masyarakat mengambil inisiatif secara sadar untuk melakukannya. Dengan adanya pemberdayaan partisipasi, berarti masyarakat akan diberi ruang sebagai subyek pemberdayaan, dan dalam pengambilan keputusan guna merubah kehidupan sosial mereka.

Organisasi berbasis masyarakat adalah aktor kunci dalam upaya perubahan pada masyarakat. Dengan cara ini mereka menyediakan sarana untuk berpartisipasi antar anggota masyarakat. Proses pemberdayaan terdiri dalam mengenali manfaat yang diperoleh oleh individu dan masyarakat dari partisipasi anggota dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan, mengumpulkan informasi tentang minat mereka dan berbagai pengetahuan lokal (Narayan dan Shah, 2000).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah organisasi diluar pemerintahan desa yang mengembangkan, membantu dan juga meningkatkan aspirasi masyarakat Desa. Salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung/bebas, mengelola diri sendiri, dan berkelanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat terdiri dari person-person dalam wilayah geografi tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan Bersama, dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1995). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan/kedermawanan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu system nilai, ideas, dan mainstreaming yang akan dicapai dalam kehidupan derajat masyarakat.

Kemandirian masyarakat ditentukan oleh sentiment, perasaan, nasib dan kebutuhan untuk mencapai memiliki kekuasaan penuh melakukan kontrol sepenuhnya atas seluruh aktivitas pembangunan. Dikatakan bahwa didalam perspektif pembangunan bertitik tolak pada masyarakat itu sendiri, kemandirian masyarakat dapat dibangun apabila telah terlaksananya gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat ditujukan untuk menggerakkan masa-masa kritis secara terorganisir dengan

dibarengi sikap inisiatif dan mandiri pada diri masyarakat (Korten, 2001).

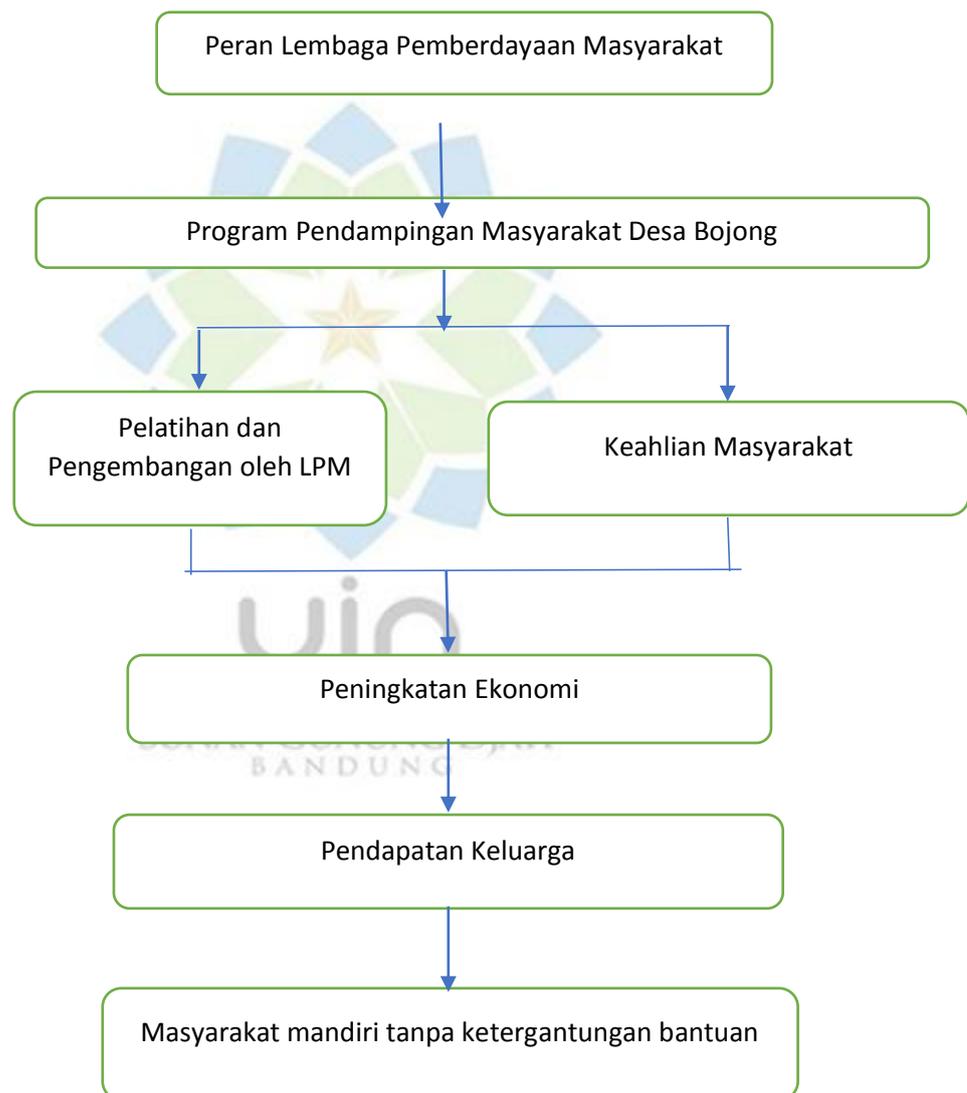
Agar Gerakan masyarakat dapat tumbuh, diperlukan ada diskresi kewenangan dari pemerintah kepada kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk melakukan tindakan sukarela membantu pengembangan inisiatif/kreativitas masyarakat. Ini berarti bahwa untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dari hasil partisipasi masyarakat perlu memperoleh dukungan partisipasi pemangku kepentingan lainnya baik secara vertical maupun horizontal.

c. Kerangka Berpikir

Untuk menciptakan pemberdayaan dan terciptanya kesadaran perlu adanya peran aktif dari masyarakat. Karena telah kita ketahui sebelumnya bahwa apa yang ditekankan dalam pengembangan masyarakat yaitu mengutamakan partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses-proses kegiatan masyarakat dan mewujudkan masa depan masyarakat dan individu untuk melakukan perubahan (Jim Ife dan Frank Tosoreiro, 2008:285).

Masyarakat mampu mengelola sumber daya yang ada disekelilingnya dengan kemampuan yang dimiliki, maka dari itu kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan. Masyarakat menduduki peran paling atas, karena dalam segala proses pembangunan memerlukan peran aktif dari setiap anggota masyarakatnya. Yang utama dari pembangunan dan pengembangan masyarakat yaitu menggali

potensi dan memberdayakan masyarakat, karena masyarakat mandiri terbentuk oleh adanya pemberdayaan, Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir diatas, maka dibuatkan skema seperti berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menempuh Langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dikampung Namicalung, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Alasan memilih lokasi jni karena peneliti menemukan beberapa poin yang dirasa tepat untuk dijadikan bahan penelitian.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi. Tujuannya mencari makna esensi dibalik fenomena. Paradigma kualitatif ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan perinci.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini lebih cenderung kepada jenis penelitian deskriptif yaitu pencarian fakta dan kebenaran dengan interpretasi yang tepat (Whintney, 1960). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif akan didapatkan data dan keterangan yang bersifat deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif, pada saat melakukan pengumpulan data akan terjadi interaksi secara langsung antara peneliti dengan sumber data. Didalam interaksi dari pihak peneliti maupun sumber data akan menciptakan pandangan dan nilai-nilai dalam persepsi

yang berbeda, maka dalam pencarian data, menganalisa bahkan pada saat pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai dari masing-masing pihak (Stainback:2003).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah seperti berikut:

- a. Peneliti didudukan sebagai instrument kunci yang langsung melakukan penelitian ke sumber data,
- b. Dalam penelitian kualitatif maka data yang dikumpulkan lebih menekankan pada kata-kata (deskripsi) maupun gambar, sehingga tidak ditemukan angka atau hitungan,
- c. Dalam penelitian kualitatif proses lebih ditekankan daripada hasil atau produk,
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif,
- e. Makna benar-benar ditekankan dalam proses penelitian kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, dengan melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen yang telah ditemukan dilapangan atau sumber data dan kemudian dibuat laporan yang benar-benar detail.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalan menggunakan data kualitatif. Peneliti mengemukakan sumber data utama dalam

penelitian ini adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto dan lain-lain. Jenis data meliputi:

- a. Data tentang program LPMD
- b. Data tentang pelaksanaan program LPMD
- c. Data tentang hasil penelitian

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Data Primer

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah RW 01 Desa Bojong Kecamatan Majalaya, pemerintah Desa Bojong dan juga masyarakat RW 01 yang turut serta dalam membantu penelitian ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari berbagai buku, jurnal dan data-data lain yang mendukung tentang masyarakat.

#### 6. Penentuan Informan atau Unit Penelitian meliputi

##### a. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini ketua LPM desa bojong, Ketua RW 05 dan juga masyarakat dilingkungan kampung Namicalung yang tahu betul mengenai kegiatan yang dicetuskan oleh LPMD.

b. Unit Analisis

Unit analisis ini mengacu pada kegiatan-kegiatan yang ada di kampung Namicalung yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi

Pada pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi dapat dijadikan opsi utama karena dalam hal ini peneliti bisa melihat, mendengar bahkan merasakan informasi yang ada secara langsung. Pada saat peneliti langsung datang ke sumber data, bisa saja pada saat itu akan muncul informasi yang sangat berharga (Stake 2010:90).

b. Teknik wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek yang terkait. Wawancara tersebut dilakukan dengan beberapa pihak agar data yang diterima lebih akurat dan lebih menunjang terhadap penelitian yang dilakukan

8. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diambil dari sumber yang berasal selain dari manusia. Contohnya dari dokumen, foto dan bahan statistic.

9. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menekankan kepada kredibilitas data, peneliti akan menilai seberapa jauh kebenaran hasil penelitian.

## 10. Teknik Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data, menggolongkan data, mengarahkan data dan membuang data yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga akan didapat hasil yang maksimal. Data yang didapat dihasilkan dari wawancara, dokumentasi dan sumber lain yang menunjang.

### b. Penyajian Data (display)

Penyajian data baru akan dilakukan setelah data yang diperlukan benar-benar peneliti dapatkan untuk nantinya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti lakukan bukan semula jadi. Dari sejak awal peneliti sudah sedikit-sedikit mencatat tentang kesimpulan dari setiap data yang didapatkan. Setelah data-data dikumpulkan dan menggolongkan data yang tepat maka peneliti akan mendapatkan kesimpulan seutuhnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Konseptual

##### 1. Peranan

###### a) Pengertian Peran

Menurut Bidle dan Thomas dalam Endang Sri Indrawati melalui buku Psikologi Sosial dijelaskan bahwa, peran (role) adalah serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam suatu hubungan sosial tertentu. Ada 5 istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

- 1) *Expectation* (harapan). Merupakan pengharapan ideal masyarakat terhadap peran yang disandang
- 2) *Norm* (norma). Menggambarkan keharusan-keharusan yang eksplisit maupun implisit yang dituntut masyarakat akan peran yang disandang
- 3) *Performance* (wujud perilaku). Merupakan tuntutan masyarakat terhadap kinerja peran yang disandang dilihat dari hasil akhirnya
- 4) *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi). Evaluasi adalah kesan positif atau negative dari masyarakat. Sanksi

- 5) adalah usaha untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah nilai negatif ke nilai positif
- 6) *Role conflict* (konflik peran). Menunjukkan bahwa manusia memiliki peran ganda tetapi harapan-harapan perannya tidak selaras.

Soerjono Soekanto (2001:24) dalam buku Pudjiastuti menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat harapan yang didalamnya ditemui seperangkat peran (*role set*) yang dimiliki oleh seseorang pada suatu posisi tertentu. Disini dipahami bahwa dalam suatu status tidak hanya memiliki satu peran saja namun juga terdapat sejumlah peran lain yang saling berikatan. Dalam peranan setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat.
- 2) Peranan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Dalam buku Syamsudin, (Aida Vitayala S. Hubeis, 2010) mengemukakan teori status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap status dijabarkan kedalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Istilah peran mengacu pada

sekumpulan norma berperilaku yang berlaku untuk suatu posisi dalam struktur sosial. Norma-norma ini terdiri dari suatu set ekspektasi dari orang lain yang mencakup tidak hanya bagaimana seseorang seharusnya menampilkan sesuatu peran, tetapi juga bagaimana seseorang seharusnya menyikapi orang lain ketika menampilkan dan sekaligus bagaimana seseorang harus menerima peran tersebut. Dalam bentuk ideal peran tampilan adalah suatu kombinasi dari peran yang dirumuskan dan peran yang diharapkan ditambah peran yang diterima, dimana tiap peran tersebut bersifat saling mempengaruhi.

Menurut Horton dan Hunt definisi peran sosial merupakan serangkaian tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Melalui belajar berperan maka individu tersebut sudah mempelajari norma-norma kebudayaan (Syamsudin, 2016:117).

Peran menurut terminology yaitu segala tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat ataupun organisasi. Adapun peranan memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Peran melibatkan sesuatu yang timbal balik dimana seseorang pada suatu saat sebagai pemberi dan disaat yang lain